

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019



Jalan Yahim No. 49 Sentani Jayapura Papua
Telp. 0967-591179 Fax 0967-591235, Website <http://www.papua.litbang.deptan.go.id>,
E-mail bptp_papua@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jayapura, 31 Desember 2019
Kuaasa Pengguna Anggaran,

Dr. H. Muhammad Thamrin, M.Si
NIP. 19670417 199503 1 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.1.3. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.4.1. Aset Tak Berwujud
 - C.4.2. Aset Lain-lain
 - C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.6. Ekuitas
 - C.6.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

- D.2. Beban Pegawai
- D.3. Beban Persediaan
- D.4. Beban Barang dan Jasa
- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura 31 Desember 2019
Kepala Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si
NIP. NIP. 19670417 199503 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp90.869.801,00 atau mencapai 342,26% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp26.550.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp12.468.635.930,00 atau mencapai 99,47% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.535.501.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.940.511.082,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp23.841.267,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp27.662.637.267,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp2.184.012,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.251.848.536,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp30.940.511.082,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp48.862.110,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp13.213.699.540,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-13.164.837.430,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp435.644.205,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-12.729.193.225,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp31.499.053.348,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-12.729.193.225,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-284.239.970,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12.454.890.929,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp30.940.511.082,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	26.550.000,00	90.869.801,00	342,26	254.916.709,00
Jumlah Pendapatan		26.550.000,00	90.869.801,00	342,26	254.916.709,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	5.099.997.000,00	5.064.384.705,00	99,30	4.738.771.645,00
Belanja Barang	B.4.	6.758.654.000,00	6.744.894.169,00	99,80	7.666.609.177,00
Belanja Modal	B.5.	676.850.000,00	659.357.056,00	97,42	5.303.910.615,00
Jumlah Belanja		12.535.501.000,00	12.468.635.930,00	99,47	17.709.291.437,00

II. NERACA

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.1.	19.780.125,00	36.617.356,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.2.	-98.901,00	-183.087,00
Persediaan	C.1.3.	6.443.800,00	24.410.000,00
Jumlah Aset Lancar		26.125.024,00	60.844.269,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	7.786.174.000,00	7.786.174.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	7.638.792.882,00	6.884.291.026,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	18.152.834.996,00	21.489.702.764,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	845.338.774,00	850.210.406,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	123.722.971,00	123.722.971,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-6.929.656.356,00	-5.718.050.173,00
Jumlah Aset Tetap		2,00	31.416.050.994,00
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1.	2.261.305,00	20.733.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2.	-77.293,00	-103.665,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		2.184.012,00	20.629.335,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	6.115.000,00	6.115.000,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	3.367.039.400,00	102.073.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-121.305.864,00	-106.659.250,00
Jumlah Aset Lainnya		3.251.848.536,00	1.528.750,00
Jumlah Aset		30.940.511.082,00	31.499.053.348,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	30.940.511.082,00	31.499.053.348,00
Jumlah Ekuitas		30.940.511.082,00	31.499.053.348,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		30.940.511.082,00	31.499.053.348,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	48.862.110,00	58.364.070,00
JUMLAH PENDAPATAN		48.862.110,00	58.364.070,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.064.384.705,00	4.738.771.645,00
Beban Persediaan	D.3.	1.915.683.224,00	2.302.541.889,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.259.951.844,00	2.350.758.568,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	607.237.702,00	610.824.145,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.183.714.344,00	2.682.479.021,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	10.980.000,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.171.835.827,00	1.080.358.422,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	-88.106,00	286.752,00
JUMLAH BEBAN		13.213.699.540,00	13.766.020.442,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-13.164.837.430,00	-13.707.656.372,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00	23.375.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00	2.943.500,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	613.148.595,00	596.747.511,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	177.504.390,00	70.465.070,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		435.644.205,00	546.713.941,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-12.729.193.225,00	-13.160.942.431,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	31.499.053.348,00	27.141.711.097,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-12.729.193.225,00	-13.160.942.431,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-284.239.970,00	63.909.954,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	-450.000,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	-283.789.970,00	63.909.954,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	12.454.890.929,00	17.454.374.728,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	30.940.511.082,00	31.499.053.348,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2006 Tanggal 1 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan dan mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengkajian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi di wilayah papua.

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
2. Penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi
3. Menyiapkan paket teknologi hasil pengkajian dan perakitan untuk menyusun materi penyuluhan
4. Pelayanan teknis kegiatan pengkajian, penelitian perakitan teknologi pertanian dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua telah menetapkan kebijakan teknis adalah sebagai berikut :

1. Perhatian Pemerintah Daerah terhadap kemaju lingkup pembangunan pertanian di wilayahnya semakin meningkat seiring dengan program otonomi dan pemekaran daerah.
2. Kegiatan sektor pertanian di daerah belum sepenuhnya berbasis pada penerapan inovasi pertanian yang benar meskipun telah tersedia di untingkup Badan Litbang Pertanian
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi memungkinkan proses produksi dan distribusi inovasi pertanian dapat dilakukan lebih cepat dan tepat guna
4. Perlindungan komersialisasi hak kekayaan intelektual (HAKI) yang berdampak pada kegairahan menemukan inovasi pertanian yang lebih produktif

Dengan telah ditetapkan beberapa program tersebut kebijakan teknis untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Pengkajian Teknologi Pertanian papua berkomitmen dengan visi misi tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Visi

Pada tahun 2014 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua menjadi lembaga Pengkajian terunggul dan profesional dalam menghasilkan dan menyediakan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di prvinsi papua

Misi

Untuk mencapai visi tersebut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua mempunyai misi sebagai berikut

1. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi sesuai dinamika kebutuhan pengguna
2. Mempercepat desiminasi pertanian spesifik lokasi kepada pengguna serta umpan balik dan stek holder untuk perbaikan teknologi spesifik lokasi dan
3. Memperkuat jejaring kerja sama lintas institusi baik pada tingkat regional maupun nasional guna pembangunan teknologi pertanian spesifik lokasi.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BALAI Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	26.550.000,00	26.550.000,00
Jumlah Pendapatan	26.550.000,00	26.550.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.641.633.000,00	5.011.285.000,00
Belanja Lembur	88.712.000,00	88.712.000,00
Belanja Barang Operasional	667.330.000,00	658.520.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.556.884.000,00	1.346.121.000,00
Belanja Barang Persediaan	1.891.930.000,00	1.853.763.000,00
Belanja Jasa	357.000.000,00	268.200.000,00
Belanja Pemeliharaan	439.110.000,00	447.950.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.605.400.000,00	2.184.100.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	507.850.000,00	516.850.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	160.000.000,00
Jumlah Belanja	11.755.849.000,00	12.535.501.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp90.869.801,00 atau mencapai 342,26% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp26.550.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	32.113.981,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	26.550.000,00	48.862.110,00	184,04
Pendapatan Lain-lain	0,00	9.893.710,00	0,00
Jumlah	26.550.000,00	90.869.801,00	342,26

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -64,35% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	32.113.981,00	9.967.444,00	222,19
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	48.862.110,00	81.739.070,00	-40,22
Pendapatan Lain-lain	9.893.710,00	163.210.195,00	-93,94
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	0,00	0,00
Jumlah	90.869.801,00	254.916.709,00	-64,35

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp12.468.635.930,00 atau 99,47% dari anggaran belanja sebesar Rp12.535.501.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019

Uraian	2019		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	5.099.997.000,00	5.078.258.165,00	99,57
Belanja Barang	6.758.654.000,00	6.744.894.169,00	99,80
Belanja Modal	676.850.000,00	659.357.056,00	97,42
Total Belanja Kotor	12.535.501.000,00	12.482.509.390,00	99,58
Pengembalian Belanja		-13.873.460,00	0.00
Total Belanja	12.535.501.000,00	12.468.635.930,00	99,47

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -29,59% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain: karena pada tahun anggaran 2018 BPTP Papua mendapat aloksi belanja modal gedung dan bangunan sedangkan di tahun anggaran 2019 nihil

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	5.064.384.705,00	4.738.771.645,00	6,87
Belanja Barang	6.744.894.169,00	7.666.609.177,00	-12,02
Belanja Modal	659.357.056,00	5.303.910.615,00	-87,57
Total Belanja	12.468.635.930,00	17.709.291.437,00	-29,59

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.064.384.705,00 dan Rp4.738.771.645,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,87% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh: karena pada tahun anggaran 2019 ada pengangkatan ASN untuk BPTP papua

**Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.989.552.165,00	4.652.140.645,00	7,25
Belanja Lembur	88.706.000,00	88.706.000,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	5.078.258.165,00	4.740.846.645,00	7,12
Pengembalian Belanja Pegawai	-13.873.460,00	-2.075.000,00	568,60
Jumlah Belanja	5.064.384.705,00	4.738.771.645,00	6,87

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.744.894.169,00 dan Rp7.666.609.177,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar -12,02% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh: adanya pengurangan kegiatan sehingga belanja barang mengalami penurunan sebesar 12,02%

**Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	658.519.958,00	554.969.672,00	18,66
Belanja Barang Non Operasional	1.345.683.888,00	1.515.073.411,00	-11,18
Belanja Barang Persediaan	1.853.283.903,00	2.119.798.925,00	-12,57
Belanja Jasa	255.747.998,00	280.715.485,00	-8,89
Belanja Pemeliharaan	447.944.078,00	513.572.663,00	-12,78
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.183.714.344,00	2.682.479.021,00	-18,59
Jumlah Belanja Kotor	6.744.894.169,00	7.666.609.177,00	-12,02
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	6.744.894.169,00	7.666.609.177,00	-12,02

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp659.357.056,00 dan Rp5.303.910.615,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -87,57% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh: bila di bandingkan dengan tahun 2018 BPTP Papua mendapat belanja modal gedung dan bangunan sedangkan di tahun anggaran 2019 tidak lagi ada belanja modal gedung dan bangunan

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.357.056,00	898.219.660,00	-44,41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.000.000,00	4.405.690.955,00	-96,37
Jumlah Belanja Kotor	659.357.056,00	5.303.910.615,00	-87,57
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	659.357.056,00	5.303.910.615,00	-87,57

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp499.357.056,00 dan Rp898.219.660,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar -44,41% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena kalau dibandingkan tahun anggaran 2018 BPTP Papua mendapatkan alokasi belanja peralatan dan mesin yaitu beberapa kendaraan bermotor roda empat dan roda dua sedangkan di tahun angaaran 2019 hanya ada pembelian satu buah kendaraan roda 4 yaitu jenis Inova untuk operasional Kepala Balai

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.357.056,00	898.219.660,00	-44,41
Jumlah Belanja Kotor	499.357.056,00	898.219.660,00	-44,41

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	499.357.056,00	898.219.660,00	-44,41

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp160.000.000,00 dan Rp4.405.690.955,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -96,37% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh Adanya anggaran untuk belanja gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2018 sedangkan di tahun anggaran 2019 BPTP Papua tidak lagi mendapatkan belanja gedung dan bangunan

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.000.000,00	4.405.690.955,00	-96,37
Jumlah Belanja Kotor	160.000.000,00	4.405.690.955,00	-96,37
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	160.000.000,00	4.405.690.955,00	-96,37

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp19.780.125,00 dan Rp36.617.356,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2019

No	Nama Debitur	31 Desember 2019
1.	Saldo neraca tahun berjalan senilai	19.780.125,00
	Jumlah	19.780.125,00

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-98.901,00 dan Rp-183.087,00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	19.780.125,00	0.5%	98.901,00
Jumlah	19.780.125,00		98.901,00

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.443.800,00 dan Rp24.410.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau

untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	1.648.800,00	150.000,00
Suku Cadang	0,00	4.850.000,00
Bahan Baku	0,00	19.410.000,00
Persediaan Lainnya	4.795.000,00	0,00
Jumlah	6.443.800,00	24.410.000,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.786.174.000,00 dan Rp7.786.174.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.684.222.882,00 dan Rp6.884.291.026,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	6.884.291.026,00
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	7.400.000,00
Pembelian	499.357.056,00
Transfer Masuk	77.124.800,00
Reklasifikasi Masuk	20.311.486,00
Perolehan Lainnya	216.500.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	-20.761.486,00
Saldo per 31 Desember 2019	7.684.222.882,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-5.563.068.613,00

Nilai Buku per 31 Desember 2019	2.121.154.269,00
--	-------------------------

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pembelian Peralatan dan Mesin berupa kendaraan Roda empat sebanyak 1 (satu) unit senilai nggal 14 Juni 2019
2. Pembelian Peralatan dan mesin Senilai Rp104.250.000,- tanggal 28 Juni 2019
3. Pembelian Peralatan dan mesin Senilai Rp45.375.000,- tanggal 12 Juli 2019
4. Reklasifikasi masuk dua ini meja kerja kayu senilai Rp11.761.486,-
5. Perolehan lainnya berupa peralatan dan mesin rumah tangga kantoryang berasal dari koreksi perubahan nilai atas renovasi Gedung dan Bangunan tahun 2018 senilai Rp216.500.000,-.
6. Mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp11.761.486 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), berasal dari:
7. Reklasifikasi keluar dua unit lemari kayu senilai Rp11.761.486,-(sebelas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

..

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp18.152.834.996,00 dan Rp21.489.702.764,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	21.489.702.764,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	160.000.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-3.111.463.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-385.404.768,00
Saldo per 31 Desember 2019	18.152.834.996,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-934.277.750,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	17.218.557.246,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

Penjelasan mutasi pengurangan atas nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Mutasi kurang atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp3.496.867.768 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), berasal dari:

1. Koreksi Pencatatan Nilai/kuantitas Gedung dan bangunan NUP 1 senilai Rp385.404.768,- berdasarkan surat penyampaian tanggapan BPK tahun 2018 Nomor R.448/PW.220/H.12.28/10/2018 Tanggal 25 Oktober 2018.
2. Penghentian aset dari penggunaan atas rekomendasi hasil Reviu Irjen terkait Bangunan aset milik kementerian pertanian yang dikuasai oleh masyarakat di kebun percobaan Koya barat dan Kebun Percobaan Jayawijaya.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp845.338.774,00 dan Rp850.210.406,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	850.210.406,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	168.904.768,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-173.776.400,00
Saldo per 31 Desember 2019	845.338.774,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-9.363.200,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	835.975.574,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Jalan dan Jembatan senilai Rp168.904.768 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), berasal dari:

Koreksi Pencatatan Nilai/kuantitas Jalan Khusus Kompleks NUP 1 senilai Rp168.274.769,- berdasarkan surat penyampaian tanggapan BPK tahun 2018 Nomor R.448/PW.220/H.12.28/10/2018 Tanggal 25 Oktober 2018.

Mutasi kurang atas nilai Jalan dan Jembatan senilai Rp24.214.400 (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah), berasal dari:

1. Penghentian aset dari penggunaan atas rekomendasi hasil Reviu Irjen terkait Bangunan aset milik kementerian pertanian yang dikuasai oleh masyarakat di kebun percobaan Koya barat dan Kebun Percobaan Jayawijaya.

...

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp123.722.971,00 dan Rp123.722.971,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-6.929.656.356,00 dan Rp-5.718.050.173,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	7.684.222.882,00	-5.563.068.613,00	2.121.154.269,00
2.	Gedung dan Bangunan	18.152.834.996,00	-934.277.750,00	17.218.557.246,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	845.338.774,00	-9.363.200,00	835.975.574,00
4.	Aset Tetap Lainnya	123.722.971,00	0,00	123.722.971,00
Akumulasi Penyusutan		26.806.119.623,00	-6.929.656.356,00	19.876.463.267,00

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp19.780.125,00 dan Rp20.733.000,00. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan yang akan datang. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Nama	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	Petrus Alexander Beding	19.780.125,00,-	36.617.356,-
2.			
3.			
	Jumlah	19.780.125,00-	36.617.356,-

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-19.780.125,00 dan Rp-103.665,00.

Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang TP/TGR
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	19.780.125,00	0,5%	98.901,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.115.000,00 dan Rp6.115.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.115.000,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.367.039.400,00 dan Rp102.073.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	102.073.000,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3.285.239.400,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-20.273.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	3.367.039.400,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-115.190.864,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	3.251.848.536,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Aset Tetap Lainnya.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-121.305.864,00 dan Rp-106.659.250,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	-6.115.000,00	0,00
2.	Aset Lain-lain	3.367.039.400,00	-115.190.864,00	3.251.848.536,00
Akumulasi Penyusutan		3.373.154.400,00	-121.305.864,00	3.251.848.536,00

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp30.940.511.082,00 dan Rp31.499.053.348,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp48.862.110,00 dan Rp58.364.070,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	9.350.000,00	1.800.000,00	419,44
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	20.605.000,00	39.583.500,00	-47,95
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	18.907.110,00	16.980.570,00	11,35
Jumlah	48.862.110,00	58.364.070,00	-16,28

Bila dibandingkan realisasi tahun 2019 dengan tahun 2018 PNBP mengalami penurunan sebesar 16,28% ini disebabkan karena kurangnya hasil penelitian yang dapat di jual untuk pendapatan PNB

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.064.384.705,00 dan Rp4.738.771.645,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.278.882.220,00	3.060.244.960,00	7,14
Beban Pembulatan Gaji PNS	43.511,00	49.474,00	-12,05
Beban Tunj. Anak PNS	65.456.842,00	66.656.374,00	-1,80

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Beras PNS	150.126.660,00	152.951.040,00	-1,85
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	355.270.000,00	354.100.000,00	0,33
Beban Tunj. PPh PNS	18.149.396,00	19.415.517,00	-6,52
Beban Tunj. Struktural PNS	20.340.000,00	7.560.000,00	169,05
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	185.596.076,00	180.274.280,00	2,95
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	363.125.000,00	350.355.000,00	3,64
Beban Tunjangan Umum PNS	117.880.000,00	110.320.000,00	6,85
Beban Uang Lembur	88.706.000,00	88.706.000,00	0,00
Beban Uang Makan PNS	419.309.000,00	346.639.000,00	20,96
Jumlah	5.064.384.705,00	4.738.771.645,00	6,87

Bila dibandingkan 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018 maka beban pegawai mengalami kenaikan sebesar 6,87% ini disebabkan karena adanya pengangkatan ASN formasi 2019 untuk BPTP Papua.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.915.683.224,00 dan Rp2.302.541.889,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	906.918.029,00	1.290.764.061,00	-29,74
Beban Persediaan konsumsi	796.495.145,00	727.488.373,00	9,49
Beban persediaan lainnya	212.270.050,00	284.289.455,00	-25,33
Jumlah	1.915.683.224,00	2.302.541.889,00	-16,80

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.259.951.844,00 dan Rp2.350.758.568,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	698.703.888,00	987.278.411,00	-29,23
Beban Barang Non Operasional Lainnya	591.580.000,00	456.295.000,00	29,65
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	152.520.000,00	152.520.000,00	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	55.400.000,00	71.500.000,00	-22,52
Beban Jasa Profesi	90.000.000,00	99.900.000,00	-9,91
Beban Keperluan Perkantoran	505.999.958,00	402.449.672,00	25,73
Beban Langganan Air	12.696.841,00	17.897.352,00	-29,06
Beban Langganan Listrik	143.971.927,00	132.560.433,00	8,61
Beban Langganan Telepon	9.079.230,00	30.357.700,00	-70,09
Jumlah	2.259.951.844,00	2.350.758.568,00	-3,86

Bila dibandingkan beban barang dan jasa pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 maka di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,86% ini disebabkan karena berkurangnya kegiatan

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp607.237.702,00 dan Rp610.824.145,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	240.994.400,00	324.200.000,00	-25,66
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	206.949.678,00	189.372.663,00	9,28
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	80.537.849,00	59.624.535,00	35,08
Beban Persediaan suku cadang	78.755.775,00	37.626.947,00	109,31
Jumlah	607.237.702,00	610.824.145,00	-0,59

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.183.714.344,00 dan Rp2.682.479.021,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2.085.193.517,00	2.554.731.235,00	-18,38
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	98.520.827,00	127.747.786,00	-22,88
Jumlah	2.183.714.344,00	2.682.479.021,00	-18,59

Bila dibandingkan beban perjalanan dinas per 31 desember 2019 dan 31 desember 2018 maka di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 18,59 % ini di sebabkan berkurangnya kegiatan penelitian.

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.980.000,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban

Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	10.980.000,00	0,00	0,00
Jumlah	10.980.000,00	0,00	0,00

Bila di lihat dari tabel diatas maka perbandingan beban barang untuk di serahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 10.980.000 sedangkan per 31 Desember 2018 nihil.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.171.835.827,00 dan Rp1.080.358.422,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	1.528.750,00	1.528.750,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	416.968.368,00	383.190.358,00	8,81
Beban Penyusutan Irigasi	64.778.074,00	64.778.074,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	25.902.333,00	25.902.334,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	985.600,00	985.600,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	1.557.500,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	661.672.702,00	602.415.806,00	9,84
Jumlah	1.171.835.827,00	1.080.358.422,00	8,47

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-88.106,00 dan Rp286.752,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-61.734,00	183.087,00	-133,72
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-26.372,00	103.665,00	-125,44
Jumlah	-88.106,00	286.752,00	-130,73

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-2.943.500,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-177.504.390,00	-70.465.070,00	151,90
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0,00	67.317.800,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	381.231.135,00	328.719.516,00	15,97
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	227.480.000,00	37.500.000,00	506,61

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	23.375.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	95.607.954,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	10.825.207,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.437.460,00	56.777.034,00	-92,18
Jumlah	435.644.205,00	546.713.941,00	-20,32

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp31.499.053.348,00 dan Rp27.141.711.097,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-12.729.193.225,00 dan Rp-13.160.942.431,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-284.239.970,00 dan Rp63.909.954,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-450.000,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-283.789.970,00 dan Rp63.909.954,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	94.954.798,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-168.904.768,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-740.000,00
Gedung dan Bangunan	-385.404.768,00
Jalan dan Jembatan	168.904.768,00

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Peralatan dan Mesin	7.400.000,00
Jumlah	-283.789.970,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp12.454.890.929,00 dan Rp17.454.374.728,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.468.635.930,00
Diterima dari Entitas Lain	-90.869.801,00
Transfer Masuk	77.124.800,00
Jumlah	12.454.890.929,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-90.869.801,00 sedangkan DKEL sebesar Rp12.468.635.930,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp77.124.800,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018030199238251000KP	77.124.800,00
Jumlah			77.124.800,00

Transfer masuk dari Ditjen Tanaman Pangan Senilai Rp77.124.800 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) sesuai BAST No.3975/PL.300/C.1/12/2019 tanggal 9 Desember 2019.

E.5.
Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp30.940.511.082,00 dan Rp31.499.053.348,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada bulan Maret 2019 tepatnya pada tanggal 16 Maret 2019 telah terjadi bencana alam banjir yang mengakibatkan garasi dan separuh pagar kantor BPTP tergerus banjir

Sampai dengan 31 Desember 2019 BPTP Papua telah mengalami 8 kali Revisi DIPA dan POK yaitu pada tanggal 15 April 2019, 20 Mei 2019, 27 Mei 2019, 19 Agustus 2019, 20 September 2019, 14 Oktober 2019, 08 November 2019 dan 27 Desember 2019

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Terdapat TGR sebesar Rp. 68.882.800,- pada kenyataannya dari nilai tersebut telah dilunasi senilai Rp. 51.363.980,- dan masih sisa yang belum di setor senilai Rp. 19.780.125,-